TAJUK RENCANA

Perhatian dan Pembinaan kepada Remaja

TITIK nol Kota Yogyakarta kini kini sedang viral. Kalau kita memasukkan kata atau kalimat tersebut di mesin pencarian google, maka akan bermunculan banyak berita terkait peristiwa memprihatinkan yang terjadi di kawasan tersebut, yaitu aksi kekerasan jalanan yang terjadi pada Rabu (8/2) pagi, sekitar pukul 04.00.

Tentu kita semua sangat prihatin, bahkan terpukul dengan adanya peristiwa tersebut. Sebab, peristiwa ini mencoreng Yogyakarta dengan segala predikatnya, yang selama ini adem ayem, tenteram dan nyaman. Setelah terjadinya peristiwa kondisi sekitar juga normal dan tampak seperti sedia kala. Hanya saja karena video rekaman peristiwa tersebut viral di media sosial, maka kesannya jadi berbeda.

Karena itu kita sangat mendukung upaya aparat kepolisian untuk mengungkap masalah ini, sehingga siapa pelaku maupun siapa korbannya bisa segera diketahui, juga cepat ditangani dengan baik. Lebih dari itu juga dilakukan antisipasi sehingga di masa-masa mendatang tidak terulang lagi kejadian seperti itu, bukan hanya di kawasan titik nol saja, tetapi juga di tempat-tempat.

Kalau mencermati peristiwa kekerasan sesama remaja ini tampaknya memang ada yang aneh, yaitu kenapa pihak korban tidak mau langsung melaporkan kepada yang berwajib. Dugaannya, baik korban maupun pelaku adalah sama-sama kelompok remaja atau semacam genk yang sudah saling mengenal, bahkan selama ini saling bermusuhan. Kalau pihak korban melapor ke aparat kepolisian, mngkin khawatir permasalahan kelompoknya juga akan terungkap.

Namun sebenarnya aparat kepolisian pasti tidak kehilangan akal untuk melacaknya. Daftar kelompok genk remaja beserta anggotanya pasti sudah ada di tangan kepolisian. Pergerakan masing-masing genk tersebut pasti juga terus dipantau, baik secara langsung maupun melalui CCTV yang dipasang di berbagai sudut jalan. Karena itu kita optimis baik pelaku maupun korban akan segera diketahui.

Yang penting lagi, hikmah dari peristiwa ini antara lain perlunya peningkatan pembinaan, bimbingan, dan perhatian kepada para remaja, terutama dari para orangtua dalam keluarga di rumah, juga dari kalangan dunia pendidikan (dengan asumsi mereka adalah para pelajar, karena masih remaja). Para remaja sebagai generasi muda dan calon generasi penerus harus dibina dengan baik, sehingga mereka lebih banyak melakukan hal-hal positif dan tidak melakukan hal-hal negatif, yang merugikan diri sendiri maupun orang.

Orangtua dan keluarga harus menjadi pembimbing utama, karena waktu di sekolah hanya terbatas. Apalagi kalau terjadi aksi kekerasan di waktu malam atau dini hari, itu pada saat-saat remaja mestinya berada di tengah-tengah keluarga. Karena itu para orangtua yang anaknya terlibat dalam aksi kekerasan di titik nol (baik korban maupun pelaku) perlu dipertanyakan, sejauh mana mereka mengawasi anak-anaknya. Apakah mereka membiarkan anak-anaknya pergi tengah malam, bahkan sampai pagi. Seandainya mereka tinggal di rumah kost, para pemilik kost dan teman-temannya mestinya mengawasi dan juga menasihati kalau ada hal-hal yang tidak semestinya.

Pendek kata, perhatian dan pembinaan kepada para remaja perlu ditingkat. Arahkan mereka pada kegiatan-kegiatan positif, misalnya untuk aktif dalam berbagai cabang olahraga atau bisa seni. Tanamkan kepada mereka untuk menunjukkan eksistensinya dengan prestasi, bukan dengan hal-hal yang merugikan. Tanamkan sportifitas kepada diri maupun kelompok remaja, sehingga kalau bersaing dalam kebenaran, bukan kebalikannya. Jangan biarkan bepergian, apalagi berkelompok pada malam hari.

Semoga para remaja kita bisa menjadi generasi yang membanggakan, bisa diandalkan, serta aksi-aksi negatif yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Kita pastikan, Yogya aman, nyaman dan tenteram. ❑-d

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Resesi Moral Melanda Indonesia?

TAHUN 2023 belum genap 45 hari kita lalui. Sebagai bangsa berbudaya, alangkah banyak persoalan yang terkait dengan moral terjadi di negeri ini? Kasus bocah Makassar yang membunuh teman karena berniat menjual organ tubuh, kasus tabrak lari hingga tewas di Cianjur malah ëmembongkarí perselingkuhan, perempuan di Jambi yang meminta anak-anak menonton adegan ranjangnya, pelajar SMA bawa perempuan bugil di mobil plat merah di Jambi, ada yang diduga mesuk di mobil pelat merah di Solok. Ada lagi menggunakan kendaraan plat merah untuk pacaran hingga di grebeg warga di Probolinggo.

Ini tentu baru yang terpublish dan terblow-up. Saya kira masih banyak peristiwa memalukan yang melanda negeri ini. Negeri yang banyak orang senang menggaungkan slogan indah namun rasanya kini menjadi tanpa makna. Negeri yang minim keteladanan pemimpin negeri. Bukankah tidak sedikit pemimpin negeri yang ketika menjadi tersangka korupsi, justru berdadah-dadah dengan senyum merekah kala berbaju oranye?

Resesi dunia yang diramalkan para ekonom belum terjadi, namun di Indonesia justru terlanda resesi moral. Jika tidak segera disikapi dengan benar, kita hanya menjadi bangsa besar yang *zonk*, tanpa isi Ini tentu sangat memrihatinkan sekaligus sangat mengerikan. ❑-d

) **Zakiah MA, Jl A Yani Kota Magelang*

Mengritisi RUU Kesehatan Secara Jernih

Alfian Dj

PEMBAHASAN RUU kesehatan terus berjalan ditengah banyaknya penolakan. Penolakan terjadi karena RUU Kesehatan ini dinyana sebagai bentuk persekongkolan legal antara pemerintah dan DPR. Pada 7 Februari 2023 Muhammadiyah bersama tujuh organisasi profesi dan masyarakat secara resmi menolak RUU Kesehatan.

Sesuai bentuknya sebagai Omnibus Law, RUU ini memiliki lebih dari 300 halaman, 20 Bab serta dilengkapi 457 pasal. Ironisnya, RUU ini berarsiran dan bahkan menafikan sejumlah undang-undang yang ada sebelumnya seperti Undang-undang tentang Wabah Penyakit Menular, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Praktik Kedokteran, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Rumah Sakit, UU Kesehatan, UU BPJS Kesehatan, UU Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan Kedokteran, UU Kesehatan Jiwa, UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan, UU Kekarantinaan, UU Kebidanan.

Investor Asing

Dasar penolakan kuat. Pasalnya, RUU Kesehatan ini terindikasi lebih berpihak kepada pemodal dan mempermudah masuknya investor asing dibidang kesehatan masuk ke Indonesia. Sebuah ironi disampaikan Menteri Kesehatan yang mengindikasikan upaya mempermudah investor asing adalah terkait pembukaan rumah sakit asing. Dalihnya, hal itu dilakukan untuk mencegah penduduk Indonesia berobat ke luar negeri.

Bukan hanya itu. Sejumlah persoalan banyak disorot. Di antara, bagaimana Kementerian Kesehatan melakukan pengkerdilan terhadap berbagai organisasi profesi? Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan kedepan bila RUU ini sukses menjadi undang-undang, Kementerian Kesehatan akan mengambil alih penerbitkan surat izin peraktik bagi dokter. Izin peraktik (STR) yang sebelumnya berlaku satu tahun dan kemudian dokter perlu memperpanjang kembali dengan meningkatkan kapasitas SDM, nanti akan berlaku lebih lama. Bahkan diwacanakan berlaku selamanya.

Kian menarik untuk dilihat dengan jernih. RUU Kesehatan juga menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dewan Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan sosial akan berada di bawah kementerian kesehatan. Dan ketentuan lain yang disebut dengan pengkerdilan organisasi

KR-JOKO SANTOSO

organisasi profesi adalah berbagai organisasi profesi kesehatan seperti Bidan, Perawat, Apoteker kini semua berada dibawah kementerian kesehatan. Bahkan anggota konsil kedokteran yang selama ini berada di bawah presiden juga akan dikerdilkan.

Realita inilah membuat banyak kalangan mensinyalir pemerintah sengaja menitipkan RUU Kesehatan ke DPR. Hal itu dilakukan pemerintah agar Omnibus Law Kesehatan nantinya tidak mendapatkan banyak tantangan dan penolakan, bila ada penolakan maka penolakan tersebut akan ditujukan pada DPR.

Mengubah Status

Ada banyak hal yang perlu dilihat kembali dengan jernih dan kritis. Pasalnya, lewat RUU ini terlihat gelagat ingin mengubah status BPJS dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang awalnya merupakan badan nirlaba ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasinya kepemupukan keuntungan. Maka kekhawatiran keberadaan BPJS menjadi badan yang mencari keuntungan akan nyata adanya.

Pengkritisan terhadap RUU Kesehatan harus terus digaungkan semua kalangan. Perlu dipahami, UU Kesehatan tidak hanya milik tenaga kesehatan semata, tetapi adalah kepentingan dan menjadi hajat hidup orang banyak. Karenanya, upaya mengkritisi dengan jernih adalah untuk menahan laju UU yang sedang dikebut penyusunannya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai RUU Kesehatan adalah bentuk penjajahan atau kolonialisasi yang bertentangan dengan kemerdekaan atau kedaulatan rakyat. Karenanya perlu ditinjau ulang, sebab tidak sesuai nilai-nilai UUD 1945.

Undang-undang dbuat dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum, terciptanya perlindungan dan jaminan hak hak warga, meningkatnya rasa keadilan. Sehingga tercipta ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dengan dasar konstitusi yang berpihak pada masyarakat. ❑-d

) **Alfian Dj, Pengajar Muallimin Yogyakarta, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pembentukan Identitas Pelaku Klithih

A Fahrur Rozi

YOGYA kembali digegerkan aksi klithih. Aksi yang terekam itu sontak viral di media social, Selasa (5/7). Disebut-sebut, sejumlah mahasiswa menjadi korban. Tragisnya, kali ini klithih terjadi di titik nol kilometer Yogya istimewa.

Klithih, berulang kali menciptakan ketakutan. Insiden kemarin mungkin menjadi pembuka di tahun 2023 setelah sebelumnya sebanyak 27 kali aksi terjadi sepanjang tahun 2022. Ahmad Fuadi (2019) dalam 'Faktor-faktor Determinasi Perilaku 'klithih' mengatakan íkeluarga bermasalah, hubungan dengan kelompok, hubungan dengan lingkungan, dan karakter individu sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku 'klithih'.

Krisis Identitas

Jika ditarik faktor induktif, kita melihat adanya krisis identitas yang dialami pelaku klithih. Istilah ini pertama kali digunakan Psikolog Erikson (1968) untuk menyebut kondisi di mana terjadi transisi pemaknaan jati diri. Pelaku klithih melarikan diri dari kegagalan interaksi sosial dengan membawa sejumlah kekecewaan. Kondisi ini menempatkan seseorang kehilangan peran dan identitas sosial. Akibatnya, klithih menjadi sarana untuk merekonstruksi peran dan pencarian ulang identitas. Dalam klithih mereka membangun daya tawar sosial, mengejar urgensi nilai, dan pengakuan dari elemen di luarnya.

Jejak klithih yang sudah berlangsung sejak lama. Klithih sudah beranjak menjadi pelarian individu dengan krisis urgensi nilai yang sudah melembaga dan membudaya. Ia seolah menjadi pelarian tunggal untuk mengekspresikan kekecewaan dan kegagalan. Dalam fakta sosial, sesuatu yang melembaga dalam tatanan, menjadi tidak terpisahkan dari masyarakat bersangkutan. Ketika ia menjadi fenomena yang demikian, bagaimana klithih bisa berakhir dengan aman?

Sekali lagi, ini adalah *resume power* seseorang yang berangkat dari kekecewaan dan kegagalan memaknai diri. Kecewa dengan masalah keluarga, gagal memahami lingkungan, atau terasing dari pergaulan sosial. Klithih melawan semacam dominasi atau hegemoni keadaan yang tak menyenangkan secara subjektif. Penanganan dengan hukum atau secara struktural hanya semakin membentuk kegamangan tanpa hasil.

Buktinya, jejak historis klithih sudah dimulai sejak tahun 1990-an. Jumlah penanganan kasuistik yang tidak terhitung anamun aksi klithih masih jamak ditemukan. Pada tahun 2022 saja, Kapolda DIY mencatat sebanyak 27 kasus yang terlapor dengan jumlah pelaku 43 orang. Namun, penegakan hukum sama sekali tidak menimbulkan efek jera dengan sanksi-sanksi formal yang diberikan. Penegakan ini gagal memahami objek yang dilawan, yaitu para remaja dengan psikologis yang rentan. Masa-masa ini berada di mana eksplorasi identitas terjadi sebagai penyesuaian pada peralihan menuju kedewasaan (Cherry, 2016).

Perangkat Sosial

Penting sebagai penanganan adalah menjadikan perangkat sosial sebagai memori dialogis secara perlahan. Di sini kita akan melakukan rekayasa sosial terhadap pola kekeluargaan, sistem pendidikan, dan ekologi pergaulan yang sehat dan berkarakter. Tidak kalah penting adalah kampanye masif soal peran pemuda, utamanya di ruang digital. Misalnya, *agent of change*, 'penerus bangsa', atau *agent of control*.

Rekaya sosial ini dilakukan dalam rangka pembentukan identitas bagi pelaku klithih. Pemangku kebijakan dan publik harus membantu mereka dalam penyadaran sebagai pemuda dengan memanfaatkan perangkat atau sistem sosial di sekitarnya. Setidaknya, usaha ini cukup memberikan efek optimisme bagi mereka melalui rekonstruksi peran. Mereka tidak pesimis dalam melihat jati diri mereka sendiri dalam pemaknaan lingkungan dan peran yang sempit.

Akibat gagal memahami peran dan membangun identitas, mereka melakulan keonaran. Maka jangan sesekali membiarkan mereka hidup tanpa peran. Bentuk dan tanamkan identitas personal dalam diri mereka. ❑-d

) **A Fahrur Rozi, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktivis Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci 1986).*

Pojok KR

Biaya haji, sejumlah item bisa diturunkan.

-- Itu harapan kita semua.

***

Pers edukasi masyarakat dan sebarkan optimisme.

-- Yang sebarkan hoaks pasti bukan pers.

***

Merapi luncurkan awan panas 1.500 meter.

-- Tetap waspada, jangan sampai lengah.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. I**SSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.